

## DAFTAR PUSTAKA

- Chandoke, Neera, 1995. *State and Society, Exploration in Political Theory*. Sage Publication India Pvt Ltd. New delhi.
- Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Diamond, Larry. 1994. *Renthinking Civil Society: Toward Democratic Consolidation, Journal of Democracy*.
- Irene H, 2007. *Demokrasi Lokal di Desa. Gayatri*. Yayasan Interaksi. Jakarta
- Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
- Luwihono, Slamet, 2007. *Mengubah Perilaku Melalui Sebuah Peraturan*. Majalah Tetruka, Edisi Januari 2007. Jakarta.
- Maleong J, Lexi, 2000. *Merode Penelitian Kualitatif*. Jakarta PT. Remaja Rosdakrya Bandung.
- Moelyarto, Tjokrowinoto, 1999, *Restruk Ekonomi dan Birokrasi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Thoha, Miftah, 2010. *Pemerintahan Yang Demokratis*. Dalam [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id) di akses tanggal 19 Oktober 2014

Mardikanto, Totok, & Soebiato, Poerwoko, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.

Moeljarto, 1995, *Politik Pembangunan*, PT Tiara Wacana Yogya, Banten

Nurcholis, Hanif, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.

Ranny, Austin, 1996. *Governing an Introduction to Political Science*. Dalam [www.yinyangstain.files.wordpress.com](http://www.yinyangstain.files.wordpress.com) diakses tanggal 19 Oktober 2014

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung.

Sharma, P. 2004. *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*. Jakarta Yayasan Menara Ilmu.

Harun, Rochat & Ardianto Elvinaro, 2012, *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.

### **Peraturan Perundang – undangan :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Desa.

1. PP nomor 72 Pasal 26 ayat 1 Tahun 2013 tentang Tugas Kepala Desa
2. PP nomor 72 Pasal 26 ayat 2 Tahun 2013 tentang Wewenang Kepala Desa
3. Pasal 26 UU nomor 6 Tahun 2013